

EKONOMI/PAJAK



**LAPORAN PENELITIAN INTERNAL  
PENGARUH PAJAK TERHADAP KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT**

Oleh:

<b>Ketua</b>	Shandy Jannifer Matitaputty.,S.E, MSi, BKP	05812014286
<b>Anggota</b>	Agnes Arie Mintarry Ch, SE, MSi, Akt., BKP	05812005267
	Rini Hastuti.,S.E.,MSi	05812001246
	Agung Sugiarto, S.E,M.Ec.dev.,M.M.,CPA., MAPPI (Cert)	05832020123

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1 Latar Belakang Masalah .....	2
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	5
1.3.3. Pengembangan Institusi .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pajak dan Wajib Pajak.....	7
2.2. Pendapatan Per Kapita.....	8
2.3. Kemiskinan.....	9
BAB.3 METODE PENELITIAN .....	10f
3.1 Data dan Sumber Data .....	10
3.2. Metode Analisa.....	12
BAB.4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	13
4.1 Pengaruh Pajak Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.....	13
4.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia.....	14
4.1.2 Korelasi dan Regresi Penerimaan Pajak terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.....	17
4.2 Pengaruh Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita di Indonesia...	18
BAB.5. SIMPULAN DAN SARAN.....	22
5.1 Simpulan.....	23
5.2 Saran.....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak selama ini dikenal sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Indonesia misalnya, sejak tahun 2007 hingga 2019 lebih dari 70 persen penerimaan negaranya berasal dari pajak. Pada tahun 2019, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai Rp 1.545,3 Triliun dengan total kontribusi terhadap total penerimaan negara mencapai 78.9% ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Penerimaan yang begitu besar dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Sehingga pada akhirnya pajak sebagai diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti yang dimaksudkan oleh Munawir S. dalam Sulastyawati (2014) bahwa fungsi pajak telah dijalankan dengan baik dapat dilihat melalui indikasi peningkatan kesejahteraan rakyat baik di bidang sosial dan ekonomi, tersedianya pelayanan-pelayanan publik yang baik, ketersediaan lapangan kerja, rendahnya tingkat pengangguran, tingginya daya beli masyarakat, dan meningkatnya kesempatan terhadap akses pendidikan.

Harapan bahwa pajak akan memfasilitasi terciptanya kesejahteraan masyarakat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk dengan sukarela menjadi masyarakat yang taat pajak. Penerimaan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak dikelola dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu ukuran kemakmuran rakyat adalah pendapatan per kapita mereka. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan nasional yang sudah memperhitungkan jumlah penduduk. Diharapkan ukuran ini lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita cukup mewakili hakikat utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghilangan kemiskinan (Chendrawan, 2017). Masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita tinggi diidentifikasi sebagai masyarakat yang makmur. Ukuran lain tingkat kesejahteraan suatu negara

adalah rendahnya angka kemiskinan. Pengelolaan pajak diharapkan ikut mengurangi angka kemiskinan suatu negara. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sulastyawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat, bahwa dana pajak belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia, sehingga pajak sangat berperan dalam memajukan negara. Hal ini dikarenakan potensi pajak yang tergalai dan penggunaan pajak yang belum maksimal. Dengan memahami arti penting pajak, maka diharapkan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, agar tingkat kesejahteraan yang lebih baik dapat dicapai (Sulastyawati, 2014).

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang dan papan. Indonesia menggunakan garis kemiskinan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan sendiri tersusun atas komponen dasar kebutuhan layak hidup baik makanan maupun non makanan. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan disebut dengan penduduk miskin, sementara penduduk yang memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan adalah penduduk tidak miskin. Pengelolaan pajak ditujukan untuk peningkatan kemakmuran rakyat termasuk di dalamnya program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Lisna et al. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan, bahwa kebijakan kapasitas fiskal daerah dari sumber utama pajak daerah dan bagi hasil pajak akan berdampak mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Lisna et al., 2013).

Di sisi lain masyarakat cenderung malas membayar pajak ketika kurang merasakan manfaat atas pajak yang mereka bayarkan. Hal ini menjadi penyebab seringkali munculnya keraguan apakah pajak benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sifat kontraprestasi pajak yang tidak langsung membuat dampak penggunaan pajak menjadi sulit diukur. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Fitriah

et al., (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Psikologis sebagai Determinan Kepatuhan Pajak: Studi Eksplorasi pada Wajib Pajak, bahwa ada keraguan besar pada wajib pajak tentang apakah anggaran pajak dikelola dengan benar dan digunakan untuk kesejahteraan umum. Asumsi tersebut yang melatarbelakangi perilaku wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan benar (Fitriah et al., 2019).

Kontraprestasi atau timbal balik atas pembayaran pajak bersifat tidak langsung. Hal ini memiliki pengertian Wajib Pajak (WP) tidak akan mendapatkan timbal balik atau kontraprestasi secara individual langsung kepada WP tersebut melainkan secara kolektif dengan penduduk lainnya dalam bentuk-bentuk fasilitas publik maupun bentuk-bentuk belanja negara lainnya. Hal ini menjadikan perlunya tinjauan akademis terkait pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian ini permasalahan utamanya adalah mengenai apakah terdapat pengaruh dan bagaimana pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah penelitian secara lebih spesifik adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pajak terhadap tingkat pendapatan per kapita di Indonesia?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pajak terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan khususnya adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pajak terhadap pendapatan per kapita Indonesia

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pajak terhadap angka kemiskinan Indonesia

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan Ipteks, pengembangan Institusi dan peningkatan kualitas masyarakat.

### **1.3.3. Pengembangan Institusi**

Penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi pada institusi dalam hal ini Program Studi Perpajakan Unika Soegijapranata untuk turut memberikan hasil kajian yang akan terkait dengan penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak dan Wajib Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Sedangkan menurut S. I. Djajaningrat dalam Resmi (2003), pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu kejadian, keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

##### **2.1.2. Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seperti dikutip dari Waluyo (2010), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2.2. Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan per kapita dimaknai sebagai rata-rata pendapatan dari setiap penduduk suatu daerah. Pendapatan perkapita didapat dari pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita adalah adalah ukuran pendapatan nasional yang sudah memperhitungkan jumlah penduduk. Diharapkan ukuran ini lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita mempunyai dua keunggulan. Pertama, GNP per kapita relatif mudah dihitung karena semua negara memiliki catatan tentang GNP atau GDP dan jumlah penduduk sehingga pendapatan per kapita bisa dihitung untuk semua negara. Kedua, ukuran ini cukup mewakili hakikat utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghilangan kemiskinan (jika asumsi distribusi pendapatan terpenuhi). Pendapatan per kapita dihitung dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi (Chendrawan, 2017).

## **2.3. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana suatu penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan memiliki berbagai pendekatan. Beberapa lembaga yang menghitung kemiskinan di Indonesia adalah badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

### **2.3.1 Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan merupakan ukuran yang dibuat oleh BPS sebagai batas pengelompokan apakah suatu penduduk tergolong miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan diihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (setara 2100 kalori/kapita/hari) dan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan pakaian dan barang/ jasa lainnya.



Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah didaerah perkotaan dan pedesaan. (Statistik Indonesia, 2009).

- Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeuaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari.
- Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha} \quad (1)$$

**Dimana** A = 0, 1, 2  
 Z = Garis kemiskinan  
 y<sub>1</sub> = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( i = 1.2.3.....q). y<sub>i</sub> < q  
 Q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  
 N = Jumlah penduduk

Jika a= 0 diperoleh *Head Ccount Indeks* (P<sub>0</sub>)

a =1 diperoleh *Poverty Gaps* (P<sub>1</sub>)

a=2 diperoleh *Poverty Severity Index* (P<sub>2</sub>)

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya kaitan antara penerimaan pajak dengan tingkat kemiskinan maupun kesejahteraan di Indonesia, beberapa penelitian tersebut diantaranya:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**  
**Hubungan Pajak dengan tingkat Kemiskinan di Indonesia**

Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan (studi di 23 provinsi di Indoensia)	Lisna, Sinaga, Firdaus dan Sutomo (2013)	Besarnya pajak daerah dan dana bagi hasil mempercepat pengentasan kemiskinan.
Pengaruh pajak, subsidi dan ZIS terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia	Ramadhan dan Mariyanti (2014)	Pajak, subsidi dan ZIS tidak secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia
Pengaruh PAD dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan di Bali (studi 2007-2013)	Arini dan Mustika (2015)	Hasil menunjukkan PAD memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
How Taxes Relate to Potential Welfare Gain and Appreciable Economic Growth (studi di negara-negara Uni Eropa)	Vatavu, Lobont, Stefa dan Olariu (2019)	Penerimaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ( <i>welfare</i> ) penduduk sebuah negara.
The impact of tax policy on the welfare state (studi di negara-negara Eropa Timur)	Brad (2012)	Hasil bervariasi diantara negara-negara sampel. Pengaruh pada kesejahteraan masyarakat tercipta di negara-negara yang memiliki tingkat kesenjangan ( <i>gini ratio</i> ) yang rendah.

Sumber : berbagai sumber, diolah, 2020

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2005). Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, serta publikasi lainnya.

#### 3.2. Metode Analisa

Pengaruh pajak terhadap kesejahteraan dilihat melalui analisa regresi. Regresi merupakan metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara variabel dengan variabel lain. Analisa regresi dilakukan dengan cara menentukan koefisien estimasi yang nantinya akan membentuk persamaan regresi. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih variabel penyebab dengan satu variabel terkena (Irianto, 2004). Variabel penyebab biasa disebut variabel *independent*, yang pada umumnya digambarkan dalam sumbu X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel dependen, terikat atau variabel Y. Dalam penelitian ini, metode regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita. Ada atau tidaknya pengaruh dilihat dari signifikansi F hitung dan t hitung. Besaran dampak/pengaruh dicerminkan dari nilai elastisitasnya pada pendapatan per kapita dan angka kemiskinan.

Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi negatif).

Korelasi Sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif.

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan besarnya korelasi jika data yang digunakan berskala interval atau rasio. Sedangkan koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas  $y$  (variabel yang dipengaruhi atau dependen) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas  $x$  (variabel yang mempengaruhi atau independen). Uji Signifikansi Koefisien Korelasi digunakan untuk menguji apakah besarnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Apabila hubungannya sama dengan nol maka menunjukkan bahwa hubungan antar variabel sangat lemah dan tidak berarti. Sebaliknya apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan nol maka hubungan tersebut kuat dan berarti (Santosa, 2004).

Signifikansi  $F$  merupakan pengujian model fit data untuk mengetahui sejauh mana variabel  $X$  (independen) dapat mempengaruhi variabel dependen ( $Y$ ). Jika nilai signifikansi  $F$  lebih besar daripada 0,05 maka model tidak fit artinya tidak dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel  $X$  terhadap  $Y$ , sedangkan jika nilai signifikansi  $F$  lebih kecil daripada 0,05 maka model fit artinya dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel  $X$  terhadap  $Y$  (Santosa, 2004).

Sedangkan signifikansi  $t$  menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05), sehingga jika  $p$  value  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan jika  $p$  value  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak (Santosa, 2004).

Uji  $t$  dikenal juga dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji  $t$  dapat dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel. Dasar pengambilan keputusan Uji  $t$  dalam analisis regresi yaitu :

1. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima
2. Jika nilai t hitung  $<$  t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak

Angka elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan satu persen pada variabel lain. Elastisitas merupakan perubahan persentase variabel dependen yang ditimbulkan akibat adanya perubahan persentase variabel independen. Elastisitas sangat baik untuk mencerminkan hubungan sebab akibat dan memperhitungkan besaran dampak akibat perubahan variabel tertentu. Dalam regresi angka elastisitas dilihat dari perubahan persentase Y akibat adanya perubahan persentase nilai X. Perubahan yang dimaksud bisa positif (searah) atau negatif (berbalik arah) sesuai tanda koefisien pada regresi. Konsep elastisitas digunakan untuk memperoleh ukuran kuantitatif respon suatu fungsi terhadap faktor yang mempengaruhi (Irianto, 2004). Jika persamaan  $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$ , maka elastisitas jangka pendek dan jangka panjang dapat dirumuskan sebagai berikut:  $ESR = (\Delta Y/\Delta X) * \bar{x}/\bar{Y}$

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengaruh Pajak Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

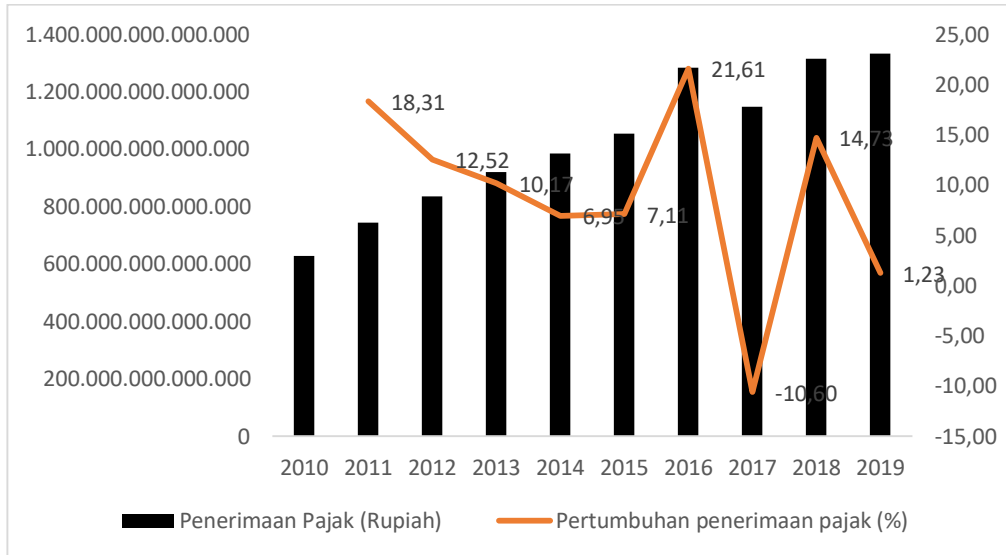
Beberapa penelitian baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri menunjukkan adanya hubungan antara pajak dan tingkat kemiskinan. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi, dimana beberapa penelitian mengatakan besaran pajak mempercepat pengentasan kemiskinan seperti penelitian yang berjudul Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan (studi di 23 provinsi di Indonesia) yang dilakukan oleh Lisna, dkk (2013) serta penelitian yang dilakukan Ramadhan (2014) yang berjudul Pengaruh pajak, subsidi dan ZIS terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

##### 4.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, dimana peruntukkannya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Perkembangan penerimaan pajak tahun 2010 hingga 2019 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.1 menunjukkan secara *trend* positif atau mengalami peningkatan, meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami fluktuasi sebagai dampak dari gejolak atau situasi ekonomi yang mengalami kontraksi. Disamping itu tingkat rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir secara umum justru menurun.

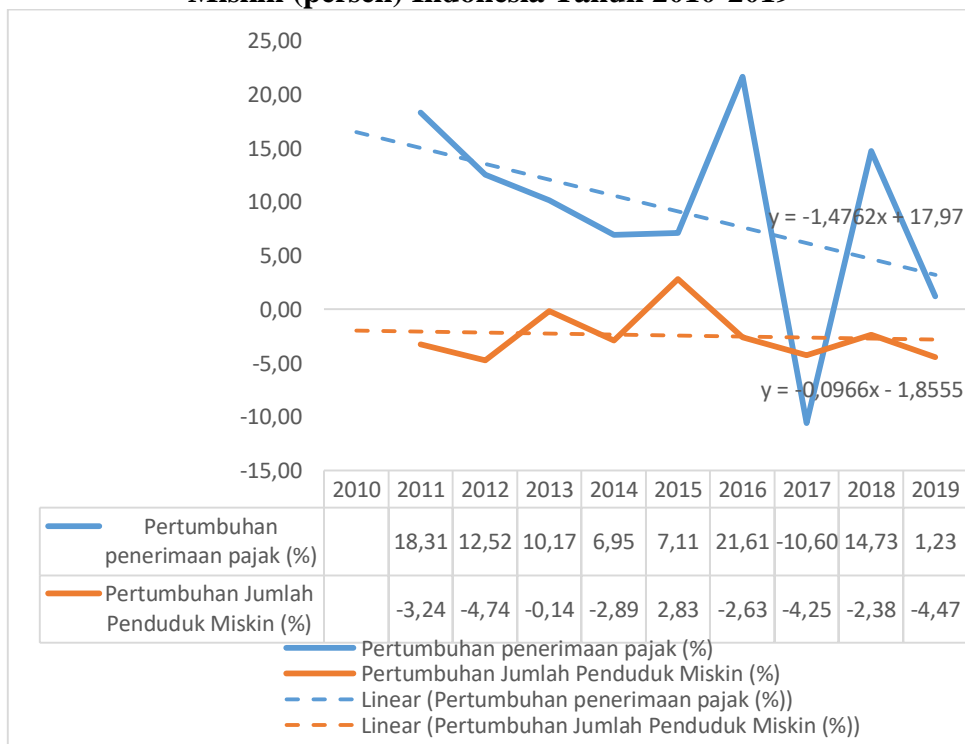
Tahun 2017 jumlah penerimaan pajak sedikit mengalami koreksi negatif. Hal ini mengingat pada tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty* yang secara instan menggenjot penerimaan dari sektor pajak. Disamping itu tahun 2017 terjadi penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia (migas dan sawit) yang sedang mengalami penurunan di pasar dunia. Dampaknya adalah pajak dari kedua sektor andalan tersebut turut mengalami perlambatan. Namun pada tahun-tahun berikutnya relatif naik meskipun kembali ke titik semula tahun 2016.

**Gambar 4.1**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak (Rupiah) dan Pertumbuhan (%)**  
**Indonesia Tahun 2010- 2019**



Sumber: Data internal diolah, 2020

**Gambar 4.2**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk**  
**Miskin (persen) Indonesia Tahun 2010-2019**



Sumber: Data internal yang diolah, 2020

Gambar 4.2 menunjukkan fenomena yang cukup mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Pertumbuhan penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir terus berfluktuasi dengan trend pertumbuhan yang menurun. Berbagai faktor penyebab memang dapat menjadi penjelas terjadinya kondisi ini, seperti situasi ekonomi global yang bergejolak, kondisi sosial politik yang beberapa waktu tengah menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilu) maupun disebabkan faktor-faktor lainnya. Sementara penduduk miskin selalu mengalami penurunan dilihat dari angka pertumbuhan yang selalu negatif. Sekalipun demikian penurunan jumlah penduduk miskin masih tergolong stagnan dengan penurunan di bawah 5 persen per tahunnya.

#### 4.1.2 Korelasi dan Regresi Penerimaan Pajak terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Korelasi pada prinsipnya menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Korelasi antara penerimaan pajak dan tingkat kemiskinan hendak menunjukkan kekuatan hubungan antara ke dua variabel tersebut. Nilai korelasi antara penerimaan pajak dan tingkat kemiskinan tersaji dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nilai Korelasi Penerimaan Pajak dan Tingkat Kemiskinan**

No	Variabel yang diuji	Nilai Korelasi
1.	Korelasi Antara Penerimaan Pajak dan Jumlah Penduduk Miskin (data tahun 1996-2019)	-0,689
2.	Korelasi Antara Penerimaan Pajak dan Prosentase Penduduk Miskin (data tahun 1996-2019)	-0,816
3.	Korelasi Antara Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (data tahun 2010-2019)	-0,147

*Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah*

Keterangan:

Interpretasi Nilai Korelasi

0,00-0,199 : sangat rendah/sangat lemah

0,20-0,399 : rendah/lemah

0,40-0,599 : sedang

0,60-0,799 : kuat

0,80-1,000 : sangat kuat



Hubungan tingkat penerimaan pajak dengan beberapa parameter tingkat kesejahteraan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan memiliki hubungan negatif yang tergolong sangat kuat terhadap prosentase jumlah penduduk miskin. Hasil ini relatif mendukung beberapa hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di Indonesia. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak, secara umum memberikan ruang gerak bagi Pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat *social safety net* yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang membuka kesempatan ruang kerja baru bagi para penganggur.
2. Pertumbuhan penerimaan pajak memiliki hubungan negatif, yang tergolong lemah terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Kenaikan penerimaan pajak dari waktu ke waktu yang lebih rendah dibandingkan kenaikan jumlah penduduk miskin, diperkirakan merupakan penjelasan yang paling rasional untuk menggambarkan temuan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa alokasi belanja negara relatif terbatas ruang lingkupnya. Sebagian besar dari anggaran belanja negara telah terserap untuk kegiatan belanja rutin. Sedangkan belanja-belanja yang bersifat produktif relatif memiliki porsi kecil dalam postur APBN kita.

**Tabel 4.2**  
**Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Jumlah Penduduk Miskin**  
**Indonesia Tahun 1996-2019**

Ringkasan Hasil Regresi Pengaruh penerimaan pajak terhadap Jumlah Penduduk Miskin	
Indikator	Nilai
Multiple R	0,689211
R Square	0,475012
Adjusted R Square	0,451149
<i>Significance F (alpha 5%)</i>	0,00019537
<i>t Stat (df 22)</i>	
Intercept	22,82514682
Penerimaan Pajak (Rupiah)	-4,46158
<i>Coefficients</i>	
Intercept	39601840,47
Penerimaan Pajak (Rupiah)	-1,04534E-08

Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah

Ada tidaknya pengaruh penerimaan pajak terhadap penurunan jumlah tingkat kemiskinan dapat dikukur melalui hasil analisis regresi linier sederhana. Secara umum, dilihat dari angka signifikansi F, hasil penelitian yang dapat ditarik dalam penelitian tentang pengaruh pajak terhadap tingkat kemiskinan ini adalah penerimaan pajak oleh negara memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara model terhadap tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bagi kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan dukungan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat. Dukungan yang dimaksud bukan hanya dalam pemanfaatannya saja namun yang lebih penting adalah pengawasan penggunaannya agar tepat sasaran dan tepat tujuan, sehingga cita-cita kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Sementara apabila membandingkan uji t statistika dengan t tabel pada degree of freedom 22, di dapati nilai t hitung/ t stat- variabel penerimaan pajak adalah -4,46158 sedangkan t tabel senilai artinya t hitung > t tabel yang maknanya terdapat pengaruh penerimaan pajak terhadap penurunan kemiskinan secara signifikan.

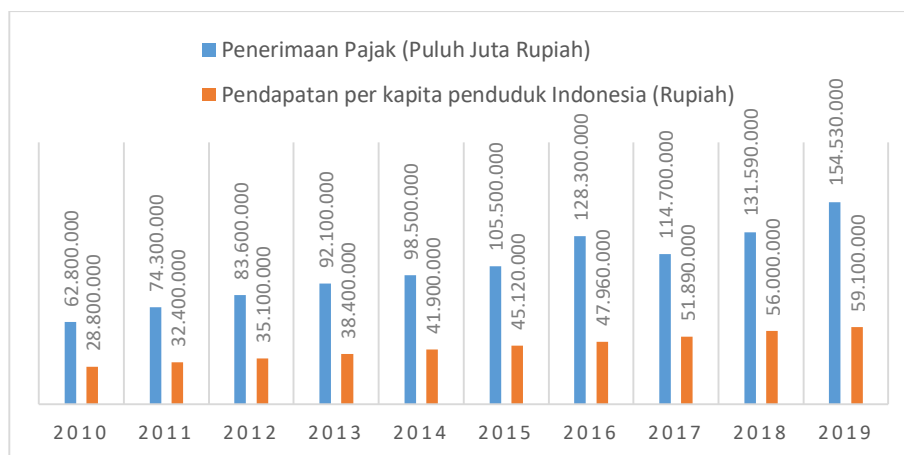
Besaran pengaruh penerimaan pajak terhadap jumlah penduduk miskin dicerminkan dari angka koefisien penerimaan pajak. Angka koefisien penerimaan pajak hanya sebesar -1,04534E-08 Tanda negatif menunjukkan penerimaan pajak menurunkan jumlah penduduk miskin, namun apabila memperhatikan angka koefisiennya, penerimaan pajak hanya menurunkan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 0,0001 (hanya sebesar -1,04534E-08) Artinya setiap 1 satuan kenaikan pajak akan menurunkan penduduk miskin sejumlah 0,00000001 orang atau setiap Rp. 100.000.000 penerimaan pajak akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1 orang. Nilai R<sup>2</sup> sendiri hanya sebesar 0,475012, hal ini berarti secara model, pengaruh penerimaan pajak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin hanya berkisar 47 persen.

## **4.2 Pengaruh Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita di Indonesia**

Berdasarkan hasil uji regresi sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.3 dan 4.4 dibawah, pajak memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita penduduk, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang merupakan hasil dari jumlah produk domestik bruto dibagi dengan jumlah angkatan kerja, diperkirakan lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebagai variabel prediktornya. Kemakmuran masyarakat akan tercapai dan dipengaruhi secara langsung oleh pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Pajak pada sisi lain, sebagaimana definisi dasarnya yang merupakan bentuk pungutan wajib yang dilakukan oleh negara pada warganya tanpa kewajiban kontraprestasi langsung, relative memiliki dampak yang tidak langsung terhadap pendapatan per kapita. Pada konteks Indonesia, dimana porsi anggaran untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat rutin lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang bersifat investasi, dampak terhadap pendapatan per kapita tentu akan lebih kecil.

**Gambar 4.3**  
**Penerimaan Pajak (Puluh Juta Rupiah) dan Pendapatan per Kapita**  
**(Rupiah) Indonesia Tahun 2010-2019**



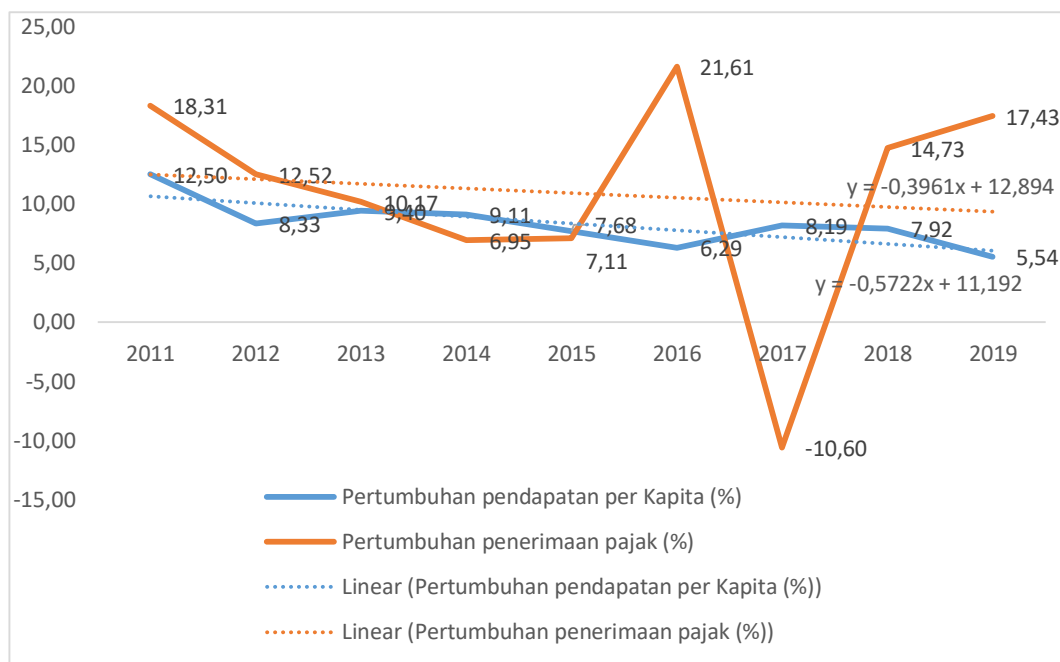
*Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah*

Gambar 4.3 di atas menyajikan perkembangan historis penerimaan pajak dan pendapatan perkapita untuk kurun waktu 2010-2019, terlihat perkembangan yang terjadi (berdasarkan angka absolut) relatif konstan dan seirama, terutama untuk pendapatan per kapita. Penerimaan pajak negara Indonesia dari tahun 2010

hingga 2016 terus mengalami peningkatan setiap tahun. Berbeda dengan penerimaan pajak yang sempat mengalami penurunan, pendapatan per kapita Indonesia terus mengalami peningkatan selama tahun 2010 hingga 2019. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita adalah sekitar 8% per tahun.

**Gambar 4.4**

**Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Pendapatan per Kapita (persen) Indonesia Tahun 2010-2019**



Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah

Perkembangan yang mengkhawatirkan justru terlihat dari pertumbuhan pendapatan per kapita berdasarkan prosentase selama kurun waktu 2011-2019. Trend yang ada menunjukkan pendapatan per kapita masyarakat mengalami kecenderungan menurun. Hasil penelitian ini sekaligus mengkonfirmasi hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Vatavu, Lobont, Stefea dan Olariu (2019) yang mengambil sampel di negara-negara Eropa Timur. Salah satu temuan penelitian mereka adalah pada satu sisi pajak sedikit berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat (yang salah satunya di-proxy-kan dengan pendapatan per kapita).

**Tabel 4.3****Nilai Korelasi Penerimaan Pajak dan Pendapatan per Kapita**

No	Variabel yang diuji	Nilai Korelasi
1.	Korelasi Antara Penerimaan Pajak dan Pendapatan perkapita (data tahun 1996-2019)	0,992

Sumber : BPS berbagai tahun, diolah

Penerimaan pajak memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap pendapatan per kapita. Hasil ini mendukung beberapa hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di Indonesia. Penerimaan pajak yang meningkat dapat mempengaruhi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui salah satu indikator yaitu pendapatan per kapita. Dengan demikian apabila penerimaan pajak meningkat maka pendapatan per kapita juga ikut meningkat, sebaliknya apabila penerimaan pajak mengalami penurunan maka pendapatan per kapita juga dapat ikut menurun.

**Tabel 4.4****Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan per Kapita Indonesia Tahun 1995-2019**

Ringkasan Hasil Regresi Pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan per kapita	
Indikator	Nilai
Multiple R	0,992047883
R Square	0,984159001
Adjusted R Square	0,983470262
<i>Significance F (alpha 5%)</i>	3,28885E-22
<i>t Stat (df 23)</i>	
Intercept	0,148076541
Penerimaan Pajak (Rupiah)	37,80117275
<i>Coefficients</i>	
Intercept	115817,5694
Penerimaan Pajak (Rupiah)	4,07462E-08

Sumber : BPS, APBN berbagai tahun, diolah

Ada tidaknya pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan per kapita dapat diukur melalui hasil analisis regresi linier sederhana. Secara umum, dilihat dari angka signifikansi F, hasil penelitian yang dapat ditarik dalam penelitian tentang pengaruh pajak terhadap pendapatan per kapita adalah penerimaan pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan secara model terhadap pendapatan

per kapita. Sementara apabila membandingkan uji t statistika dengan t tabel pada degree of freedom 25, didapatkan nilai t hitung/ t stat- variabel penerimaan pajak adalah 37,80117275. Angka koefisien penerimaan pajak sebesar 4,07462E-08. Tanda positif menunjukkan penerimaan pajak meningkatkan pendapatan per kapita, apabila memperhatikan angka koefisiennya, penerimaan pajak meningkatkan pendapatan per kapita lebih dari 0,0001 (sebesar 4,07462E-08). Nilai R<sup>2</sup> sendiri sebesar 0,984159001, hal ini berarti secara model, pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan per kapita sekitar 98 persen.

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita ini tentu menjadi sinyalemen yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah selaku pengelola pajak, sekaligus sebagai pihak yang mengelola “operasional” negara ini. Kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan per kapita (yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita) perlu ditempuh, terutama pada kondisi ekonomi yang sedang mengalami kontraksi dampak pandemi COVID-19.

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Perkembangan penerimaan pajak tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan trend positif, meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami fluktuasi sebagai dampak dari gejolak atau situasi ekonomi yang mengalami kontraksi. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir secara umum justru menurun. Hal tersebut dapat disebabkan berbagai faktor seperti situasi ekonomi global yang bergejolak, kondisi sosial politik dan lain-lain.
2. Jumlah penduduk miskin selalu mengalami penurunan dengan angka pertumbuhan yang selalu negatif. Namun penurunan jumlah penduduk miskin masih tergolong stagnan dengan penurunan di bawah 5% per tahunnya.
3. Pendapatan per kapita untuk kurun waktu 2010-2019 menunjukkan perkembangan yang relatif konstan dan seirama. Nilai pendapatan per kapita terus mengalami peningkatan selama tahun 2010 hingga 2019. Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita adalah sekitar 8% per tahun. Sedangkan pertumbuhan pendapatan per kapita berdasarkan prosentase selama kurun waktu 2011-2019 mengalami kecenderungan menurun.
4. Penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan memiliki hubungan negatif yang tergolong sangat kuat terhadap prosentase jumlah penduduk miskin.
5. Pertumbuhan penerimaan pajak memiliki memiliki hubungan negatif, yang tergolong lemah terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Pengaruh penerimaan pajak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin berkisar 47 persen.
6. Pajak memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan per kapita penduduk, meskipun pengaruhnya tidak signifikan. Penerimaan pajak memiliki

hubungan positif yang sangat kuat terhadap pendapatan per kapita. Pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan per kapita sekitar 98 persen.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah perlu meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun pembinaan lainnya, hal ini mengingat pajak terbukti signifikan menurunkan angka kemiskinan.
2. Pengaruh pajak terhadap pendapatan per kapita tidak signifikan terjadi, hal ini dimungkinkan penerimaan pajak baru akan berdampak pada pendapatan per kapita dalam jangka waktu tertentu. Terkait hal ini pemerintah dapat mempercepat penyerapan anggaran yang terkait dengan penyediaan fasilitas publik agar masyarakat tetap dapat merasakan manfaat penerimaan pajak negara terhadap kesejahteraan melalui fasilitas publik.
3. Pemerintah selaku pengelola pajak sekaligus sebagai pihak yang mengelola “operasional” negara perlu menerbitkan kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan per kapita.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arini; Made Dwi Setyadhi Mustika. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol 4 (3): 1140-1163.
- Brad, Anca Maria. 2012. *The impact of tax policy on the welfare state*. Conference Proceedings, Szeged, University of Szeged , Vol. ISBN 9: 182-195.
- Chendrawan, Tony S. (2017). SEJARAH PERTUMBUHAN EKONOMI. *Tirtayasa EKONOMIKA* Vol. 12, No 1, April 2017
- Fitriah, Elis Anisah et al. (2019). Faktor-Faktor Psikologis sebagai Determinan Kepatuhan Pajak: Studi Eksplorasi pada Wajib Pajak. *PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 6, Nomor 1, 2019: 99-110
- Irianto, Agus. (2004). *Statistik Konsep Dasar & Aplikasinya*. Jakarta : Kencana
- Kementrian Keuangan. (2019). APBN 2019. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Lisna, Vera; Bonar M. Sinaga; Muhammad Firdaus dan Slamet Sutomo. 2013. Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan:Sutau Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol 14 (1): 1-26.
- Mardiasmo. 2016, *Perpajakan Edisi Revisi 2016*, Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia.2005
- Muana, Nanga, 2001. *Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ramadhan, Hikhmatiar; Tatik Mariyanti. 2014. Pengaruh Pajak, Subsidi dan ZIS terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Media Ekonomi* Vol 22 (2): 123-132.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan : Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Santosa, Singgih. (2004). SPSS Statistik Multivariat. Jakarta : Elex Media Komputindo

Sulastyawati, Dwi. (2014). HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT. Diakses dari : <https://www.academia.edu/9989886>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Vatavu, Sorana; Oana-Ramona Lobont; Petru Stefa dan Daniel Brindescu-Olariu. 2019. *How Taxes Relate to Potential Welfare Gain and Appreciable Economic Growth*. Sustainability Journal Vol 11: 1-16.

Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

**SURAT TUGAS**  
Nomor: 00304/B.7.2/ST/FEB/I/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

- Nama : Shandy Jannifer M., SE., M.Si., BKP NIDN : 0623018704  
Agnes Arie M. C., SE., M.Si., Akt, BKP., CA NIDN : 0605117802  
P. Rini Hastuti, SE., M.Si., Akt. NIDN : 0605117802  
Agung Sugiarto, SE., MM, MEd, Dev, CPA
- Status : Tenaga Pendidik / Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas : Melakukan Penelitian tentang : *Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*
- Tempat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang
- Waktu : Periode Ganjil & Genap Tahun Akademik 2019 - 2020
- Keterangan : Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab,  
serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Semarang, 21 Januari 2020

Dekan,



Dr. OCTAVIANUS D. HARTOMO, M.Si., Akt.

NPP: 058.1.1995.170

-----  
Telah melaksanakan tugas  
Mengetahui :